

ABSTRAK

Perkosaan di Indonesia hakikatnya hanya dapat dilindungi dengan adanya BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terutama Pasal 285 KUHP. Padahal maraknya kasus perkosaan yang terjadi selama ini tidak hanya terjadi pada perempuan-perempuan yang normal, tetapi juga dialami oleh wanita *down syndrome*, salah satunya di Kota Temanggung dengan Laporan Polisi No. LP/B/106/VII/2019/POLDA JTG/RES TMG/SEK BJN. Masih kurangnya perlindungan bagi penyandang *down syndrome* sebagai korban perkosaan kiranya perlu dilakukan pembaruan hukum. Penulisan ini akan terfokus pada dua permasalahan, yaitu: *pertama* Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) dalam konstruksi keadilan dan kepastian hukum? dan *kedua*, Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum?

Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Tesis ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang selalu menitikberatkan pada sumber dan jenis data sekunder yang terbagi atas tiga bagian, yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode *library research* dengan teknik analisis data kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, kebijakan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) saat ini hanya terbatas untuk melindungi korban dengan status psikis normal ataupun korban anak sehingga belum memenuhi konstruksi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum; *kedua*, terdapat dua upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan penderita disabilitas (*down syndrome*) yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum, yaitu perluasan makna Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP dan melakukan pembaharuan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Korban; Perkosaan; Down Syndrome, Keadilan, Kepastian*

ABSTRACT

Rape in Indonesia The essence can only be protected by the chapter of XIV about crimes against decency, especially Article 285 of the Criminal Code. Even though the rise of rape cases that occurred so far did not only occur in normal women, but also experienced by Down Syndrome women, one of them in Temanggung City with police reports No. LP / B / 106 / VII / 2019 / Polda JTG / Res TMG / SEK BBN. There is still a lack of protection for down syndrome as a victim of rape should be needed for legal renewal. This writing will focus on two problems, namely: First How is the legal protection policy on victims of rape in disabilities (down syndrome) in the construction of justice and legal certainty? And second, how about efforts to realize legal protection of victims of rape in disabilities (down syndrome) oriented to legal justice and certainty?

The research method uses normative juridic with legislation approaches, comparative approaches, and case approaches. This thesis has analytical descriptive research specifications that always focus on the source and type of secondary data divided into three parts, namely: Primary, secondary, and tertiary legal materials collected through the Library Research method with qualitative data analysis techniques that emphasize the analysis of the dedukative conclusion process and inductive and in the dynamics of the relationship between phenomena observed using scientific logic.

The results of the study and discussion of this study were divided into two, namely: First, the legal protection policy on victims of rape in disabilities (down syndrome) is currently only limited to protecting victims with normal psychic status or child victims so they have not fulfilled the construction of the values of justice and legal certainty; Second, there are two efforts to realize legal protection against victims of rape in disabilities oriented to justice and legal certainty, namely the expansion of the meaning of Article 286 and Article 290 of the Criminal Code and committing legal renewal.

Keywords: *legal protection; Victim; Rape; Down Syndrome, Justice, Certainty*